

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Hasil Penelitian**

##### **4.1.1 Gambaran Lokasi Penelitian**

###### **1. Pembentukan BLUD SPAM**

Badan Layanan Umum Daerah Sistem Penyediaan Air Minum (BLUD SPAM) Provinsi Nusa Tenggara Timur terbentuk pada tahun 2009 dengan Surat Keputusan Nomor: 176/KEP/HK/2009 tanggal 22 Juni 2009 tentang Persetujuan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Sistem Penyediaan Air Minum (PPK-BLUD SPAM) Provinsi/Wilayah pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pembentukan BLUD SPAM dimaksud adalah untuk mengoptimalkan pelayanan air bersih dari kapasitas sumber air baku yang berada di wilayah Bendungan Tilong sebesar 150 liter/detik kepada masyarakat. Pelayanan air bersih yang dilakukan oleh pihak BLUD SPAM adalah kepada masyarakat Kota Kupang maupun masyarakat Kabupaten Kupang melalui PDAM atau Lembaga-lembaga. Kapasitas sumber tersebut mampu melayani masyarakat dengan jumlah penduduk yang terlayani sebanyak 103.680 jiwa atau setara dengan 17.280 sambungan rumah (SR).

###### **2. Visi, Misi dan Sasaran (*Goal*) BLUD SPAM**

a. Visi

Menjadikan BLUD SPAM Provinsi NTT yang sehat dan mandiri sehingga dapat melayani kebutuhan air minum yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas dan kontinuitas bagi kebutuhan minimal air minum masyarakat dalam lingkungan damai, aman dan nyaman.

b. Misi

- 1) Melayani kebutuhan air minum yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas dan kontinuitas bagi kebutuhan minimal air minum masyarakat.
- 2) Menjalankan manajemen BLUD SPAM dengan penerapan PPK BLUD dengan baik berdasarkan prinsip efektif, efisiensi, dan produktifitas.
- 3) Sebagai pendukung pelaksanaan kebijakan Pimpinan Daerah dalam pelayanan masyarakat khususnya dalam pemenuhan kebutuhan air minum masyarakat yang layak.

c. Sasaran (*Goal*)

- 1) Melayani kebutuhan air minum curah yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas dan kontinuitas bagi kebutuhan minimal air minum masyarakat.
- 2) Mengemban fungsi sosial dan prinsip ekonomi (*cost re covery*) dalam operasionalnya sebagai perangkat layanan masyarakat Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

- 3) Mengelola sumber daya alam dan sumber daya yang ada dengan rekayasa dan rancang bangun teknologi per air minuman.
  - 4) Bekerjasama dengan masyarakat dan lembaga terkait dalam menerapkan PPK-BLUD SPAM melalui kemitraan atas dasar saling menguntungkan.
  - 5) Meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia pegawai BLUD SPAM yang profesional melalui program peningkatan Kapasitas secara konseptual.
3. Upaya pencapaian visi, misi dan sasaran

Dalam mencapai Vis, Misi dan Sasaran (goal) Badan Layanan Umum Daerah Sistem Penyediaan Air Minum (BLUD SPAM) Provinsi Nusa Tenggara Timur harus dilengkapi dokumen perencanaan strategis yang komprehensif antara lain:

1. Membuat Pola Tata Kelola PPK BLUD SPAM,
2. Menyusun Rencana Strategis Bisnis PPK BLUD SPAM,
3. Menyusun Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) BLUD SPAM tahunan,
4. Menyusun Standar Pelayanan Minimal (SPM ) BLUD SPAM didasarkan kemampuan dan sumber daya pada saat ini,
5. Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD SPAM dan pengelolaan administrasi umum lainnya,

6. Melaksanakan kegiatan operasional teknik meliputi perencanaan operasional produksi, transmisi, distribusi dan pemeliharaan sistem penyediaan air minum yang menjadi kewenangannya,
7. Memberikan informasi, melaksanakan komunikasi dan sosialisasi tentang program, rencana dan target Pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan air minum masyarakat,
8. Melaksanakan majemen pengelolaan dan penerapan PPK BLUD SPAM secara profesional.

#### **4.1.2 Analisis Perkembangan**

##### **1. Pendapatan**

Pendapatan BLUD SPAM diperoleh dari jumlah secara keseluruhan hasil penjualan air minum curah serta mendapatkan bantuan dana dari pemerintah provinsi yang dihitung dalam rupiah per satu tahun untuk membiayi secara keseluruhan kegiatan operasional perusahaan. Pendapatan BLUD SPAM dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabe 4.1  
Pendapatan BLUD SPAM  
Tahun 2016-2017

No	Bulan	Pendapatan 2016	Pendapatan 2017
1.	Januari	125.457.873	289.781.186
2.	Februari	113.571.405	247.772.032
3.	Maret	128.713.380	242.295.624
4.	April	155.162.280	282.541.300
5.	Mei	150.720.185	250.069.548
6.	Juni	188.208.355	324.014.026
7.	Juli	113.446.710	315.547.816
8.	Agustus	183.044.825	247.821.872
9.	September	108.856.450	277.434.556
10.	Oktober	169.390.950	298.202.124
11.	November	121.172.635	219.289.834
12.	Desember	190.547.815	320.203.556
<b>Jumlah</b>		1.748.292.863	3.314.973.474

*Sumber: Data Sekunder BLUD SPAM Provinsi NTT, Tahun 2018*

Berdasarkan data pada tabel 4.1 bahwa pendapatan pada tahun 2017 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2016. Hal ini terjadi karena adanya kenaikan tarif air minum curah pada bulan Januari 2017. Bila dilihat dari trend pendapatan tahun 2016, maka pendapatan tertinggi berada pada bulan Desember dan pendapatan terendah berada pada bulan September. Sedangkan pada tahun 2017, pendapatan tertinggi berada pada bulan Juni. Hal ini disebabkan karena adanya permintaan akan kebutuhan air curah yang meningkat. Sedangkan pendapatan yang terendah berada pada bulan November dikarenakan terjadinya pemadaman listrik pada bulan tersebut sehingga distribusi air kurang lancar.

## 2. Penjualan

Data penjualan yang diperoleh BLUD SPAM adalah menjual air minum curah kepada masyarakat melalui PDAM dan Lembaga-lembaga. Penjualan air minum curah kepada PDAM dan Lembaga-lembaga dikenakan dengan tarif air minum curah tetap atau *flat*. Artinya berapapun pemakaian air mium curah oleh pelanggan, tarifnya tetap sama dan tidak mengalami peningkatan. Berikut adalah data pelanggan BLUD SPAM:

Tab 4.2  
Penjualan BLUD SPAM  
Tahun 2016-2017

No	Jenis pelanggan	Rata-rata Penjualan (m <sup>3</sup> )	
		2016	2017
1.	PDAM Kota Kupang	52.979	54.973
2.	Undana Kupang	8.750	8.913
3.	Politeknik Negeri	1.776	1.821
4.	Politani Negeri	1.488	1.593
5.	Angkasa Pura I	5.888	4.320
6.	Masyarakat MBR	7.408	7.982
	<b>TOTAL</b>	<b>76.289</b>	<b>79.602</b>

Sumber: Data Sekunder BLUD SPAM Provinsi NTT, Tahun 2018

Data tabel 4.2 menunjukkan bahwa penjualan BLUD SPAM mengalami peningkatan dari tahun 2016 ke tahun 2017. Bila dilihat dari rata-rata penjualan, peningkatan penjualan tersebut tidak begitu besar namun bila dikalikan dengan nilai tarif yang baru, peningkatan

tersebut naik sangat signifikan. Bila dilihat dari rata-rata penjualan tahun 2016, penjualan terbesar untuk PDAM Kota Kupang dan penjualan terendah pada Politeknik Negeri, hal ini terjadi juga pada tahun 2017. Penjualan ke PDAM Kota Kupang tertinggi dikarenakan permintaan akan kebutuhan air curah yang tinggi dengan memperhatikan jumlah pelanggan yang cukup besar.

### 3. Utang jangka pendek dan jangka panjang

Utang jangka pendek dan utang jangka panjang pada BLUD SPAM Provinsi NTT dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabe 4.3  
Utang Jangka Pendek dan Utang Jangka Panjang  
BLUD SPAM Provinsi NTT  
Tahun 2016-2017

No	Utang Jangka Pendek	Tahun 2016	Tahun 2017	Utang jangka panjang	Tahun 2016	Tahun 2017
1.	Pajak air permukaan	42.305.750	51.530.125	Cadangan dana meter	496.785.000	672.850.000
2.	Biya pengerjaan pipa yang harus dibayar	12.307.250				
<b>Total</b>		<b>54.613.000</b>	<b>51.530.125</b>		<b>496.785.000</b>	<b>672.850.000</b>

*Sumber: Data Sekunder BLUD SPAM Provinsi NTT, Tahun 2018*

Dari data pada tabel 4.3 dapat dibaca perkembangan utang jangka panjang maupun utang jangka pendek yang terjadi pada BLUD SPAM Provinsi NTT dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2017. Pajak air permukaan dari tahun 2016 ke 2017 mengalami peningkatan karena terjadi penjualan air yang meningkat juga. Cadangan dana meter dari tahun 2016 ke 2017 mengalami peningkatan tahun 2017 hal ini dikarenakan adanya penambahan

pemasangan meter baru dalam jumlah yang cukup bagi pelanggan PDAM Kota Kupang.

#### 4. Aktiva

Data akan ditampilkkan sumber kekayaan atau sumber ekonomi BLUD SPAM Provinsi NTT tahun 2016 dan 2017.

Beberapa bentuk aktiva diantaranya:

Tabe 4.4  
Aktiva BLUD SPAM Provinsi NTT  
Tahun 2016-2017

No	Aktiva	Tahun 2016	Tahun 2017
I.	AKTIVA LANCAR		
1.	Kas dan bank	744.907.265	811.145.680
2.	Piutang usaha	248.918.485	187.298.720
3.	Penyisihan piutang usaha	-	-
	Jumlah piutang usaha	248.918.485	187.298.720
4.	Persediaan bahan operasi	59.981.000	65.000.000
	Jumlah aktiva lancar	1.053.806.750	1.063.444.400
II	AKTIVA TETAP		
1.	Instalasi Sumber	8.248.705.149	6.853.174.350
2.	Instalasi Pompa	7.905.259.750	5.763.960.215
3.	Instalasi Transmisi & Distribusi	21.994.237.825	18.887.958.990
4.	Bangunan Gedung	823.375.200	84.850.900
5.	Inventaris Kantor	347.895.000	35.527.500
	Jumlah Nilai Perolehan	39.319.472.924	31.625.471.955
	Akumulasi Penyusutan	(589.792.093)	(906.046.812)
	Nilai Buku Aktiva Tetap	38.729.680.831	30.719.425.143
III	AKTIVA LAINNYA		
1.	Bahan Instalasi	57.722.050	281.357.800
2.	Aktiva yang tidak berfungsi	1.309.782.000	7.694.000.969
	Jumlah aktiva lainnya	1.367.504.050	7.975.358.769

*Sumber: Data Sekunder BLUD SPAM Provinsi NTT, Tahun 2018*

Dari data pada tabel 4.4 menunjukkan perkembangan aktiva yang terjadi pada BLUD SPAM Provinsi NTT dari tahun 2016



sampai dengan tahun 2017. Untuk jumlah aktiva lancar terjadi peningkatan dari tahun 2016 ke tahun 2017, hal ini disebabkan karena terjadi peningkatan pada kas dan bank serta persediaan bahan operasi. Peningkatan pada kas dan bank disebabkan penambahan pendapatan sedangkan peningkatan persediaan bahan operasi karena bertambahnya jumlah persediaan.

Aktiva tetap pada tahun 2016 dan 2017 mengalami penurunan, hal ini disebabkan terjadi penurunan pada beberapa komponen antara lain instalasi sumber, instalasi pompa, instalasi transmisi dan distribusi, bangunan gedung serta inventaris kantor. Penyebab penurunan kelima komponen diatas karena nilai penyusutan.

Untuk aktiva lainnya mengalami peningkatan dari tahun 2016 ke 2017 hal ini disebabkan karena adanya peningkatan aktiva yang tidak berfungsi berupa aset yang tidak berfungsi lagi serta peningkatan pada bahan instalasi.

#### **4.1.3 Analisis Laporan Keuangan**

Untuk melakukan penilaian kinerja BLUD SPAM Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016-2017, berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja BLUD SPAM Provinsi Nusa Tenggara Timur. Data-

data laporan keuangan BLUD SPAM Provinsi NTT, dalam analisis kinerja adalah sebagai berikut:

1. Neraca

a. Neraca tahun 2016

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan tahun 2016 mengenai aktiva, kewajiban, modal dan laba/rugi pada tanggal pelaporan. Jumlah aktiva lancar per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp. 1.053.806.750 yang terdiri dari kas dan bank sebesar Rp. 744.907.265, piutang usaha sebesar Rp. 248.918.485 dan persediaan bahan operasi sebesar Rp. 59.981.000. Jumlah kewajiban jangka pendek per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp. 54.613.000 yang terdiri dari hutang pajang sebesar Rp. 42.305.750 dan biaya yang masih harus dibayar sebesar Rp. 12.307.250. Jumlah kewajiban jangka panjang per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp. 496.785.000 yang terdiri dari cadangan dana meter sebesar Rp. 496.785.000. (*Lampiran 1*)

b. Neraca tahun 2017

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan tahun 2017 mengenai aktiva, kewajiban, modal dan laba/rugi pada tanggal pelaporan. Jumlah aktiva lancar per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp. 1.063.444.400 yang terdiri dari kas dan bank sebesar Rp. 811.145.680, piutang usaha sebesar Rp. 187.298.720 dan persediaan bahan operasi sebesar 65.000.000. Jumlah

kewajiban jangka pendek per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp. 51.530.125 yang terdiri dari hutang pajak sebesar Rp. 51.530.125. Jumlah kewajiban jangka panjang per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp.672.850.000 yang terdiri dari cadangan dana meter sebesar Rp. 672.850.000. (*Lampiran 2*)

## 2. Laporan laba/rugi

Laba/rugi tahun berjalan merupakan kondisi laba/rugi BLUD SPAM Provinsi NTT per 31 Desember 2016 dengan kondisi defisit sebesar Rp. 1.949.086.937, sedangkan kondisi laba/rugi BLUD SPAM Provinsi NTT per 31 Desember 2017 dengan kondisi defisit sebesar Rp. 621.183.726. Hal menandakan bahwa BLUD SPAM Provinsi Nusa Tenggara Timur masih belum mampu mendapatkan keuntungan dan masih membutuhkan bantuan dana dari pemerintah provinsi untuk membiayai sebagian biaya kebutuhan operasional. (*Lampiran 3*)

## 3. Aktiva tetap

Aktiva tetap dicatat berdasarkan nilai perolehan setelah dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus yang didasarkan pada taksiran umur ekonomis dari aktiva tetap yang bersangkutan.

Nilai buku aktiva tetap per 31 Desember 2016 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp.38.729.680.831 dan Rp.30.719.425.143. (*Lampiran 5*)

4. Data kapasitas sumber, kapasitas terpasang, kapasitas produksi dan kapasitas terjual.

Laporan data kapasitas sumber, kapasitas terpasang, kapasitas produksi dan kapasitas terjual adalah data aktivitas perusahaan yang menunjukkan air baku yang diambil dari sumber dan diolah untuk didistribusikan atau dijual kepada masyarakat yang dihitung pada tahun 2016, yaitu jumlah kapasitas sumber sebesar 336.960 m<sup>3</sup>, jumlah kapasitas terpasang 168.480 m<sup>3</sup>, jumlah kapasitas produksi sebesar 112.320 dan jumlah kapasitas air yang terjual sebesar 76.289 m<sup>3</sup>.(Lampiran 6)

Sedangkan tahun 2017, yaitu jumlah kapasitas sumber sebesar 336.960 m<sup>3</sup>, jumlah kapasitas terpasang 168.480 m<sup>3</sup>, jumlah kapasitas produksi sebesar 112.320 dan jumlah kapasitas air yang terjual sebesar 79.602 m<sup>3</sup>. (Lampiran 7)

5. Data cakupan pelayanan

Data cakupan pelayanan adalah keseluruhan jumlah penduduk kota kupang dan kabupaten kupang yang terlayani dengan kapasitas terjual sebesar 76.289 m<sup>3</sup> atau setara dengan 23.840 jiwa pada tahun 2016 dan 79.602 m<sup>3</sup> atau setara dengan 24.875 jiwa pada tahun 2017. Jumlah cakupan pelayan dari tahun 2016 sampai dengan 2017 mengalami peningkatan sebesar 4,16%, sehingga dari hasil pelayanan air minum curah masih sangat rendah dalam melayani seluruh masyarakat yang akan terlayani.(Lampiran 8)

#### 4.1.4 Analisis Kinerja

##### 4.1.4.1 Analisis Aspek Keuangan

##### 1. Aspek Keuangan Tahun 2016

Untuk memperoleh gambaran tentang perkembangan keuangan perusahaan maka perlu dilakukan analisis terhadap data keuangan dari perusahaan yang bersangkutan dimana data keuangan tersebut tercermin di dalam laporan keuangan dan ukuran yang digunakan dalam analisis keuangan adalah rasio. Rasio-rasio yang dianalisis dari aspek keuangan adalah sebagai berikut:

##### 1. Rasio laba terhadap aktiva produktif:

$$\frac{\text{Laba sebelum pajak}}{\text{Aktiva produktif}} \times 100\% = \frac{-Rp. 1.949.086.937}{Rp. 39.377.194.974} \times 100\% \\ = -4,95$$

Berdasarkan Kepmendagri, Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja, maka nilai -4,95% berada pada rasio < 0% sehingga skor atau nilainya adalah 1. Artinya perusahaan belum mampu menghasilkan laba melainkan mengalami kerugian sebesar 4,95% dengan menggunakan aktiva produktif yang ada.

Berdasarkan data pada lampiran 1, rendahnya tingkat rasio 4,95% dikarenakan adanya beberapa faktor yang mempengaruhi, yaitu:

- Penetapan harga jual per meter kubik hanya memperhitungkan harga pokoknya saja tanpa memperhitungkan adanya unsur laba

sesuai tingkat keuntungan yang diharapkan, dan tarif harga jual pada tahun 2016 sebesar Rp. 2.305,- per meter kubik.

- Tingginya tingkat kehilangan air selama 2 tahun berturut-turut sebesar 30,21% pada tahun 2016 dan 29,13% pada tahun 2017.

2. Rasio laba terhadap penjualan:

$$\frac{\text{Laba sebelum pajak}}{\text{Penjualan}} \times 100\% = \frac{-Rp. 1.949.086.937}{Rp. 1.813.033.763} \times 100\% \\ = -107\%$$

Berdasarkan Kepmendagri, Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja, maka nilai -107% berada pada rasi < 0% sehingga skor atau nilai 1. Artinya perusahaan belum mampu menghasilkan laba melainkan mengalami kerugian sebesar 107% dengan menggunakan aktiva produktif yang ada.

Berdasarkan data pada lampiran 1, rendahnya tingkat rasio 107% dikarenakan adanya beberapa faktor yang mempengaruhi, yaitu:

- Penetapan harga jual per meter kubik hanya memperhitungkan harga pokoknya saja tanpa memperhitungkan adanya unsur laba sesuai tingkat keuntungan yang diharapkan, dan tarif harga jual pada tahun 2016 sebesar Rp. 2.305,- per meter kubik.
- Tingginya tingkat kehilangan air selama 2 tahun berturut-turut sebesar 30,21% pada tahun 2016 dan 29,13% pada tahun 2017.

3. Rasio aktiva lancar terhadap utang lancar:

$$\frac{\text{Aktiva lancar}}{\text{Utang lancar}} = \frac{\text{Rp. 1.053.806.750}}{\text{Rp. 54.613.000}} = 19,29$$

Berdasarkan Kepmendagri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja, maka nilai 19,29 berada pada rasi  $> 3,0$  sehingga skor atau nilainya adalah 1. Artinya perusahaan belum mampu menjamin setiap rupiah utang lancar dengan Rp. 19,29 aktiva lancar yang dimiliki. Dengan demikian perusahaan berada pada posisi yang kurang baik, sehingga perusahaan masih belum mampu untuk menjamin setiap utang lancar yang ada.

Berdasarkan data pada lampiran 1, rasio ini berhubungan dengan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Pada tahun 2016 ada kewajiban jangka pendek sebesar Rp. 54.613.000, selain itu juga yang menyebabkan pada tahun 2016 mencapai nilai yang tinggi karena penyisihan piutang yang besar terjadi pada tahun 2016.

4. Rasio utang jangka panjang terhadap ekuitas:

$$\frac{\text{Utang jangka panjang}}{\text{Ekuitas}} = \frac{\text{Rp. 496.785.000}}{\text{Rp. 39.201.904.694}} = 0,012$$

Berdasarkan Kepmendagri, Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja, maka nilai 0,012 berada pada rasio  $\leq 0,5$  sehingga skor atau nilai 5. Artinya perusahaan mampu menjamin setiap utang jangka panjang dengan Rp. 0,012 ekuitas yang dimiliki.

Berdasarkan data pada lampiran 1, menyatakan kemampuan perusahaan untuk menjamin setiap rupiah hutang perusahaan

menjadi menurun. Keadaan yang demikian antara lain karena adanya faktor penyertaan modal pemerintah pusat pada tahun 2016 sebesar Rp. 42.548.680.568.

5. Rasio total aktiva terhadap total utang:

$$\frac{\text{Total aktiva}}{\text{Total utang}} = \frac{\text{Rp. 41.150.991.631}}{\text{Rp. 551.398.000}} = 74,63$$

Berdasarkan Kepmendagri, Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja, maka nilai 74,63 berada pada rasio > 2,0 sehingga memperoleh skor atau nilai 5. Artinya perusahaan mampu menjamin setiap rupiah total utangnya sebesar Rp. 74,63 dari aktiva yang dimiliki.

Berdasarkan data pada lampiran 1, maka dalam keadaan ini kemampuan perusahaan untuk menjamin setiap hutang perusahaan menjadi menurun. Hal yang demikian antara lain karena adanya faktor penyertaan modal pemerintah pusat pada tahun 2016 sebesar Rp. 42.548.680.568.

6. Rasio biaya operasi terhadap pendapatan operasi:

$$\frac{\text{Biaya operasi}}{\text{Pendapatan operasi}} = \frac{\text{Rp. 2.303.055.574}}{\text{Rp. 1.813.033.763}} = 1,27$$

Berdasarkan Kepmendagri, Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja, maka rasio 1,27 berada pada rasio > 1,0 sehingga memperoleh skor atau nilai 1. Artinya perusahaan belum mampu memperoleh satu rupiah pendapatan operasi dengan mengeluarkan biaya operasi sebesar Rp. 1,27.



Berdasarkan data pada lampiran 1, bahwa keadaan yang demikian antara lain disebabkan karena faktor-faktor penurunan efisiensi yang berkaitan dengan tingginya tingkat kehilangan air. Hal ini dapat diketahui dari realisasi penjualan dan biaya yang menunjukkan bahwa pada tahun 2016 mengalami peningkatan.

7. Rasio aktiva produktif terhadap penjualan air:

$$\frac{\text{Aktiva produktif}}{\text{Penjualan air}} = \frac{\text{Rp. 39.377.194.974}}{\text{Rp. 1.748.292.863}} = 22,52$$

Berdasarkan Kepmendagri, Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja, maka nilai 22,52 berada pada rasio > 8,0 sehingga skor atau nilai 1. Artinya perusahaan belum mampu memperoleh satu rupiah penjualan air dengan menggunakan Rp. 22,52 pada aktiva produktif.

Rendahnya tingkat rasio yang hanya 22,52% dikarenakan ada beberapa faktor yang mempengaruhi, yaitu:

- Jumlah investasi yang ditanamkan untuk aktiva produktif pada tahun 2016 sebesar Rp. 39.783.487.581 dibanding dengan total aktiva sebesar Rp. 41.150.991.631.
- Pendapatan penjualan air minum curah hanya sebesar Rp. 1.813.033.763 sedangkan biaya meningkat sebesar Rp. 2.303.055.574.

8. Rasio penagihan piutang:

$$\frac{\text{Piutang usaha}}{\text{Jumlah penjualan per hari}} = \frac{\text{Rp. 248.918.485}}{\text{Rp. 5.603.503}} = 44,42$$

Berdasarkan Kepmendagri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja, maka nilai 44,42 berada pada rasio  $\leq 60$  sehingga memperoleh skor atau nilainya adalah 1. Artinya perusahaan mampu melakukan penagihan piutang usaha dari penjualan sebesar 44,42.

Dalam kenyataan ini kemampuan perusahaan lebih baik, hal ini dikarenakan oleh meningkatnya penjualan air minum curah. Penjualan air minum curah berhubungan dengan jumlah  $\text{m}^3$  yang didistribusikan dengan yang terjual perbandingannya antara yang terjual dengan yang didistribusikan sebesar 67,92%.

9. Rasio epektifitas penagihan:

$$\begin{aligned} \frac{\text{Rekening tertagih}}{\text{Penjualan air}} \times 100\% &= \frac{\text{Rp. 1.499.374.378}}{\text{Rp. 1.748.292.863}} \times 100\% \\ &= 85,76\% \end{aligned}$$

Berdasarkan Kepmendagri, Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja, maka nilai 85,76% berada pada rasio  $> 85\% - 90\%$  sehingga memperoleh skor atau nilainya adalah 4. Artinya perusahaan mampu menghasilkan sejumlah penerimaan dari rekening penjualan air yang diterbitkan selama satu tahun sebesar 85,76% dari penjualan.

Rasio ini menunjukkan bahwa tingkat penjualan air terhadap rekening yang ditagih berbanding lurus, sehingga jumlah rupiah yang tertagih mengalami peningkatan yang baik dari jumlah air curah yang terjual.

## 2. Aspek Keuangan Tahun 2017

Untuk memperoleh gambaran tentang perkembangan keuangan perusahaan maka perlu dilakukan analisis terhadap data keuangan dari perusahaan yang bersangkutan dimana data keuangan tersebut tercermin di dalam laporan keuangan dan ukuran yang digunakan dalam analisis keuangan adalah rasio. Rasio-rasio yang dianalisis dari aspek keuangan adalah sebagai berikut:

### 1. Rasio laba terhadap aktiva produktif:

$$\frac{\text{Laba sebelum pajak}}{\text{Aktiva produktif}} \times 100\% = \frac{-Rp. 621.183.726}{Rp. 31.906.829.755} \times 100\% \\ = -1,95$$

Berdasarkan Kepmendagri, Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja, maka nilai -1,95% berada pada rasio < 0% sehingga memperoleh skor atau nilai 1. Artinya perusahaan belum mampu menghasilkan laba melainkan mengalami kerugian sebesar 1,95% dengan menggunakan aktiva produktif yang ada.

Berdasarkan data pada lampiran 1, rendahnya tingkat rasio 4,95% dikarenakan adanya beberapa faktor yang mempengaruhi, yaitu:

- Penetapan harga jual per meter kubik hanya memperhitungkan harga pokoknya saja tanpa memperhitungkan adanya unsur laba sesuai tingkat keuntungan yang diharapkan, dan tarif harga jual pada tahun 2016 sebesar Rp. 2.305,- per meter kubik.

- Tingginya tingkat kehilangan air yang selama 2 tahun berturut-turut sebesar 30,21% pada tahun 2016 dan 29,13% pada tahun 2017.

2. Rasio laba terhadap penjualan:

$$\frac{\text{Laba sebelum pajak}}{\text{Penjualan}} \times 100\% = \frac{-Rp. 621.183.726}{Rp. 3.381.366.374} \times 100\%$$

$$= -18,37\%$$

Berdasarkan Kepmendagri, Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja, maka nilai -18,37% berada pada rasi  $\leq 0\%$  sehingga memperoleh skor atau nilai 1. Artinya perusahaan belum mampu menghasilkan laba melainkan mengalami kerugian sebesar 18,37% dengan menggunakan aktiva produktif yang ada.

Berdasarkan data pada lampiran 1, rendahnya tingkat rasio 107% dikarenakan adanya beberapa faktor yang mempengaruhi, yaitu:

- Penetapan harga jual per meter kubik hanya memperhitungkan harga pokoknya saja tanpa memperhitungkan adanya unsur laba sesuai tingkat keuntungan yang diharapkan, dan tarif harga jual pada tahun 2016 sebesar Rp. 2.305,- per meter kubik.
- Tingginya tingkat kehilangan air selama 2 tahun berturut-turut sebesar 30,21% pada tahun 2016 dan 29,13% pada tahun 2017.

3. Rasio aktiva lancar terhadap utang lancar:

$$\frac{\text{Aktiva lancar}}{\text{Utang lancar}} = \frac{\text{Rp. 1.063.444.400}}{\text{Rp. 51.530.125}} = 20,63$$

Berdasarkan Kepmendagri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja, maka nilai 20,63 berada pada rasio > 3,0 maka skor atau nilai 1. Artinya perusahaan belum mampu menjamin setiap rupiah utang lancar dengan Rp. 20,63 aktiva lancar yang dimiliki. Dengan demikian perusahaan berada pada posisi yang kurang baik, sehingga perusahaan masih belum mampu untuk menjamin setiap utang lancar yang ada.

Berdasarkan data pada lampiran 1, rasio ini berhubungan dengan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Pada tahun 2016 ada kewajiban jangka pendek sebesar Rp. 54.613.000, selain itu juga yang menyebabkan pada tahun 2016 mencapai nilai yang tinggi karena penyisihan piutang yang besar terjadi pada tahun 2016.

4. Rasio utang jangka panjang terhadap ekuitas:

$$\frac{\text{Utang jangka panjang}}{\text{Ekuitas}} = \frac{\text{Rp. 672.850.000}}{\text{Rp. 31.443.043.617}} = 0,021$$

Berdasarkan Kepmendagri, Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja, maka nilai 0,021 berada pada rasio  $\leq 0,5$  sehingga memperoleh skor atau nilai 5. Artinya perusahaan mampu menjamin setiap utang jangka panjang dengan Rp. 0,021 ekuitas yang dimiliki. Berdasarkan data pada lampiran 1, menyatakan kemampuan perusahaan untuk menjamin setiap rupiah hutang perusahaan

menjadi menurun. Keadaan yang demikian antara lain karena adanya faktor penyertaan modal pemerintah pusat pada tahun 2016 sebesar Rp. 42.548.680.568.

5. Rasio total aktiva terhadap total utang:

$$\frac{\text{Total aktiva}}{\text{Total utang}} = \frac{\text{Rp. 32.064.227.343}}{\text{Rp. 724.380.125}} = 44,26$$

Berdasarkan Kepmendagri, Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja, maka nilai 44,26 berada pada rasio > 2,0 sehingga memperoleh skor atau nilai 5. Artinya Rp. 1 utang dijamin oleh perusahaan sebesar Rp. 44,26 aktiva.

Berdasarkan data pada lampiran 1, maka dalam keadaan ini kemampuan perusahaan untuk menjamin setiap hutang perusahaan menjadi menurun. Hal yang demikian antara lain karena adanya faktor penyertaan modal pemerintah pusat pada tahun 2016 sebesar Rp. 42.548.680.568.

6. Rasio biaya operasi terhadap pendapatan operasi:

$$\frac{\text{Biaya operasi}}{\text{Pendapatan operasi}} = \frac{\text{Rp. 4.002.550.100}}{\text{Rp. 3.381.366.374}} = 1,18$$

Berdasarkan Kepmendagri, Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja, maka nilai 1,18 berada pada rasio > 1,0 sehingga memperoleh skor atau nilai 1. Artinya perusahaan belum mampu memperoleh satu rupiah pendapatan operasi dengan mengeluarkan biaya operasi sebesar Rp. 1,18.

Berdasarkan data pada lampiran 1, bahwa keadaan yang demikian antara lain disebabkan karena faktor-faktor penurunan efisiensi yang berkaitan dengan tingginya tingkat kehilangan air. Hal ini dapat diketahui dari realisasi penjualan dan biaya yang menunjukkan bahwa pada tahun 2016 mengalami peningkatan.

7. Rasio aktiva produktif terhadap penjualan air:

$$\frac{\text{Aktiva produktif}}{\text{Penjualan air}} = \frac{\text{Rp. 31.906.829.755}}{\text{Rp. 3.314.973.474}} = 9,62$$

Berdasarkan Kepmendagri, Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja, maka nilai 9,62 berada pada rasio > 8,0 sehingga memperoleh skor atau nilai 1. Artinya perusahaan belum mampu memperoleh aktiva produktif sebesar Rp. 9,62 dengan melakukan penjualan air sebesar Rp. 1.

Rendahnya tingkat rasio yang hanya 22,52% dikarenakan ada beberapa faktor yang mempengaruhi, yaitu:

- Jumlah investasi yang ditanamkan untuk aktiva produktif pada tahun 2016 sebesar Rp. 39.783.487.581 dibanding dengan total aktiva sebesar Rp. 41.150.991.631.
- Pendapatan penjualan air minum curah hanya sebesar Rp. 1.813.033.763 sedangkan biaya meningkat sebesar Rp. 2.303.055.574.

8. Rasio penagihan piutang:

$$\frac{\text{Piutang usaha}}{\text{Jumlah penjualan per hari}} = \frac{\text{Rp. 187.298.720}}{\text{Rp. 10.624.915}} = 17,63$$

Berdasarkan Kepmendagri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja, maka nilai 17,63 berada pada rasio  $\leq 60$  sehingga memperoleh skor atau nilai 1. Artinya perusahaan mampu melakukan penagihan piutang usaha dari penjualan sebesar 17,63.

Dalam kenyataan ini kemampuan perusahaan lebih baik, hal ini dikarenakan oleh meningkatnya penjualan air minum curah. Penjualan air minum curah berhubungan dengan jumlah m<sup>3</sup> yang didistribusikan dengan yang terjual perbandingannya antara yang terjual dengan yang didistribusikan sebesar 67,92%.

9. Rasio epektifitas penagihan:

$$\begin{aligned} \frac{\text{Rekening tertagih}}{\text{Penjualan air}} \times 100\% &= \frac{\text{Rp. 3.127.674.754}}{\text{Rp. 3.314.973.474}} \times 100\% \\ &= 94,35\% \end{aligned}$$

Berdasarkan Kepmendagri, Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja, maka nilai 94,35% berada pada rasio  $> 90\%$  sehingga memperoleh skor atau nilai 4. Artinya perusahaan mampu menghasilkan sejumlah penerimaan dari rekening penjualan air yang diterbitkan selama satu tahun sebesar 94,35% dari penjualan.

Rasio ini menunjukkan bahwa tingkat penjualan air terhadap rekening yang ditagih berbanding lurus, sehingga jumlah rupiah yang tertagih mengalami peningkatan yang baik dari jumlah air curah yang terjual.

### 3. Penilaian Kinerja Aspek Keuangan



Sebelum melakukan klasifikasi tingkat keberhasilan perusahaan maka nilai yang diperoleh dari masing-masing indikator di jumlahkan dan hasil penjumlahan tersebut merupakan jumlah nilai yang diperoleh oleh masing-masing aspek. Jumlah keseluruhan nilai untuk aspek keuangan masing-masing adalah tahun 2016 memperoleh nilai 20 dan 2017 memperoleh nilai 20. Hal ini menunjukkan bahwa penilaian kinerja dari aspek keuangan menurut Kepmendagri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja adalah kurang sehat, karena standar nilai aspek keuangan adalah 45 sedangkan capaiannya lebih kecil yaitu sebesar 20 saja. (*Lampiran 9*)

#### **4.1.4.2 Analisis Aspek Operasional**

##### **1. Aspek Operasional Tahun 2016**

Untuk memperoleh gambaran tentang perkembangan perusahaan dari aspek operasional, maka perusahaan yang bersangkutan dimana data operasional tersebut tercermin dalam rasio. Rasio-rasio yang dianalisis dari aspek operasional adalah sebagai berikut:

##### **1. Cakupan Pelayanan**

$$\frac{\text{Jumlah penduduk terlayani}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100\% = \frac{23.840}{103.680} \times 100\% \\ = 22,99\%$$

Berdasarkan Kepmendagri, Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja, maka nilai 22,99% berada pada rasi > 20% - 40% sehingga memperoleh skor atau nilainya adalah 2. Artinya cakupan pelayanan BLUD SPAM Provinsi NTT kepada masyarakat sebesar 22,99% atau 23.840 jiwa dari 103.680 jiwa total jumlah penduduk karena hal tersebut disesuaikan dengan kemampuan bak penampung (*reservoir*) serta sistim transmisi dan distribusi yang ada.

Keadaan yang demikian antara lain disebabkan karena kurangnya bak penampung atau reservoir yang besar, kurangnya tenaga teknis yang handal serta keadaan pipa-pipa transmisi dan distribusi yang sudah cukup lama dan tidak digantikan dengan yang baru.

2. Kualitas air distribusi, yaitu pemenuhan syarat yang ditetapkan instansi berwenang mengenai kualitas air yang dikonsumsi oleh masyarakat. Kemampuan perusahaan menghasilkan air yang didistribusikan kepada pelanggan sudah memenuhi syarat air bersih, sehingga berdasarkan Kepmendagri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja, maka bila air yang dikonsumsi oleh masyarakat sudah memenuhi standar air bersih maka skor atau nilainya adalah 2. Artinya perusahaan mampu menyediakan air yang berkualitas dan memenuhi syarat air bersih karena air tersebut telah

diuji melalui laboratorium Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

3. Kontinuitas air, yaitu pelanggan mendapatkan aliran air secara penuh atau tidak. Perusahaan mampu mendistribusikan air kepada pelanggan walaupun belum semua pelanggan mendapatkan aliran air 24 jam, sehingga berdasarkan Kepmendagri Nomor 74 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja, maka belum semua pelanggan dapat menikmati aliran air selama 24 jam sehingga memperoleh skor atau nilainya adalah 1. Artinya perusahaan mampu mendistribusikan air kepada pelanggan walaupun belum semua pelanggan dapat menikmati aliran air selama 24 jam namun hal tersebut disesuaikan dengan bak penampungan serta sistem transmisi dan distribusi yang ada.
4. Produktifitas pemanfaatan instalasi produksi

$$\frac{\text{Kapasitas produksi}}{\text{Kapasitas terpasang}} \times 100\% = \frac{1.347.840}{2.021.760} \times 100\% = 66,66\%$$

Berdasarkan Kepmendagri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja, maka nilai 66,67% berada pada rasio  $\leq 70\%$  sehingga memperoleh skor atau nilainya adalah 1. Artinya perusahaan mampu mengelola kapasitas produksi sebesar 66,67% dari kapasitas terpasang sebesar 2.021.760m<sup>3</sup> karena disesuaikan dengan kebutuhan serta bak penampung dan sistem jaringan pipa distribusi yang terpasang.

5. Tingkat kehilangan air

$$\frac{\text{Jumlah m3 air yang didistribusikan} - \text{yang dijual}}{\text{Jumlah m3 air yang didistribusikan}} \times 100\%$$
$$\frac{1.078.272 - 915.466}{1.078.272} \times 100\% = 15,09\%$$

Berdasarkan Kepmendagri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja, maka nilai 15,09% berada pada rasio  $\leq 20\%$  sehingga memperoleh skor atau nilainya adalah 4. Artinya perusahaan mampu menekan tingkat kehilangan air karena tingkat kehilangan air sebesar 15,09%, masih berada di bawah standar nasional yaitu sebesar 28%.

6. Peneraan meter air

$$\frac{\text{Jumlah pelanggan yang meter airnya ditera}}{\text{Jumlah seluruh pelanggan}} \times 100\%$$

Perusahaan belum melakukan peneraan meter air induk sehingga berdasarkan Kepmendagri Nomor 74 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja, maka skor atau nilainya tidak ada. Artinya perusahaan belum melakukan peneraan meter air induk pelanggan dan tidak termasuk meter yang baru.

7. Kemampuan penanganan pengaduan rata-rata per bulan

$$\frac{\text{Jumlah pengaduan yang telah selesai ditangani}}{\text{Jumlah seluruh pengaduan}} \times 100\%$$

Kemampuan penanganan pengaduan setiap bulan pada tahun 2017 tercatat, namun karena pelayanan BLUD SPAM adalah kepada PDAM dan Lembaga sehingga pelayanan lebih cepat dan langsung

ditangani sesegera mungkin. Hal tersebut berdasarkan Kepmendagri Nomor 74 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja, maka skor atau nilainya adalah 2. Artinya perusahaan melakukan pencatatan terhadap kemampuan penanganan pengaduan dan langsung menuju pada tempat kejadian. Hal ini menunjukkan bahwa setiap ada pengaduan dari konsumen tentang sistem pengaliran ataupun kebocoran pipa dan terjadinya kekeruhan air yang terjadi dilapangan maka langsung ditanggapi cepat oleh pihak BLUD SPAM pada lokasi dan tujuan yang dimaksud. Oleh karena itu indikator ini diberi skor atau nilai 2 yaitu sesuai dengan aturan pedoman penilaian kinerja yang ada.

8. Kemudahan pelayanan yaitu tersedianya sarana penunjang dalam rangka memberikan kemudahan pelayanan. Namun perusahaan belum melakukan pelayanan diluar jam kantor sehingga jika terjadi kebocoran atau kerusakan pipa-pipa transmisi maupun distribusi tidak dapat dilakukan. Berdasarkan Kepmendagri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja, maka indikator ini mendapatkan skor atau nilainya adalah 1. Artinya perusahaan belum menyediakan sarana penunjang dalam rangka memberikan kemudahan pelayanan diluar jam kantor dan sarana tersebut hanya pada saat jam kantor saja.

## 2. Aspek Operasional Tahun 2017

Untuk memperoleh gambaran tentang perkembangan perusahaan dari aspek operasional, maka perusahaan yang bersangkutan dimana data operasional tersebut tercermin dalam rasio. Rasio-rasio yang dianalisis dari aspek operasional adalah sebagai berikut:

### 1. Cakupan Pelayanan

$$\frac{\text{Jumlah penduduk terlayani}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100\% = \frac{24.875}{103.680} \times 100\% \\ = 23,99\%$$

Berdasarkan Kepmendagri, Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja, maka nilai 23,99% berada pada rasi > 20% - 40% sehingga memperoleh skor atau nilainya adalah 2. Artinya cakupan pelayanan BLUD SPAM Provinsi NTT kepada masyarakat sebesar 23,99% atau 24.875 jiwa dari 103.680 jiwa total jumlah penduduk karena hal tersebut disesuaikan dengan kemampuan bak penampung (*reservoir*) serta sistim transmisi dan distribusi yang ada.

Keadaan yang demikian antara lain disebabkan karena kurangnya bak penampung atau reservoir yang besar, kurangnya tenaga teknis yang handal serta keadaan pipa-pipa transmisi dan distribusi yang sudah cukup lama dan tidak digantikan dengan yang baru.

### 2. Kualitas air distribusi, yaitu pemenuhan syarat yang ditetapkan instansi berwenang mengenai kualitas air yang dikonsumsi oleh masyarakat. Kemampuan perusahaan menghasilkan air yang didistribusikan kepada pelanggan sudah memenuhi syarat air bersih,

sehingga berdasarkan Kepmendagri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja, maka bila air yang dikonsumsi oleh masyarakat sudah memenuhi standar air bersih maka skor atau nilainya adalah 2. Artinya perusahaan mampu menyediakan air yang berkualitas dan memenuhi syarat air bersih karena air tersebut telah diuji melalui laboratorium Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

3. Kontinuitas air, yaitu pelanggan mendapatkan aliran air secara penuh atau tidak. Perusahaan mampu mendistribusikan air kepada pelanggan walaupun belum semua pelanggan mendapatkan aliran air 24 jam, sehingga berdasarkan Kepmendagri Nomor 74 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja, maka belum semua pelanggan dapat menikmati aliran air selama 24 jam sehingga memperoleh skor atau nilainya adalah 1. Artinya perusahaan mampu mendistribusikan air kepada pelanggan walaupun belum semua pelanggan dapat menikmati aliran air selama 24 jam namun hal tersebut disesuaikan dengan bak penampungan serta sistem transmisi dan distribusi yang ada.

4. Produktifitas pemanfaatan instalasi produksi

$$\frac{\text{Kapabilitas produksi}}{\text{Kapabilitas terpasang}} \times 100\% = \frac{1.347.840}{2.021.760} \times 100\% = 66,66\%$$

Berdasarkan Kepmendagri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja, maka nilai 66,67% berada pada rasio  $\leq 70\%$  sehingga memperoleh skor atau nilainya adalah 1. Artinya

perusahaan mampu mengelola kapasitas produksi sebesar 66,67% dari kapasitas terpasang sebesar 2.021.760 m<sup>3</sup> karena disesuaikan dengan kebutuhan serta bak penampung dan sistim jaringan pipa distribusi yang terpasang.

5. Tingkat kehilangan air

$$\frac{\text{Jumlah m3 air yang didistribusikan} - \text{yang dijual}}{\text{Jumlah m3 air yang didistribusikan}} \times 100\%$$

$$\frac{1.078.272 - 955.228}{1.078.272} \times 100\% = 11,41\%$$

Berdasarkan Kepmendagri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja, maka nilai 11,41% berada pada rasio  $\leq 20\%$  sehingga memperoleh skor atau nilainya adalah 4. Artinya perusahaan mampu menekan tingkat kehilangan air karena tingkat kehilangan air sebesar 11,41%, masih berada di bawah standar nasional yaitu sebesar 28%.

6. Peneraan meter air

$$\frac{\text{Jumlah pelanggan yang meter airnya ditera}}{\text{Jumlah seluruh pelanggan}} \times 100\%$$

Perusahaan belum melakukan peneraan meter air induk sehingga berdasarkan Kepmendagri Nomor 74 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja, maka skor atau nilainya tidak ada. Artinya perusahaan belum melakukan peneraan meter air induk pelanggan dan tidak termasuk meter yang baru.



7. Kemampuan penanganan pengaduan rata-rata per bulan

$$\frac{\text{Jumlah pengaduan yang telah selesai ditangani}}{\text{Jumlah seluruh pengaduan}} \times 100\%$$

Kemampuan penanganan pengaduan setiap bulan pada tahun 2017 tercatat, namun karena pelayanan BLUD SPAM adalah kepada PDAM dan Lembaga sehingga pelayanan lebih cepat dan langsung ditangani sesegera mungkin. Hal tersebut berdasarkan Kepmendagri Nomor 74 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja, maka skor atau nilainya adalah 2. Artinya perusahaan melakukan pencatatan terhadap kemampuan penanganan pengaduan dan langsung menuju pada tempat kejadian. Hal ini menunjukkan bahwa setiap ada pengaduan dari konsumen tentang sistem pengaliran ataupun kebocoran pipa dan terjadinya kekeruhan air yang terjadi dilapangan maka langsung ditanggapi cepat oleh pihak BLUD SPAM pada lokasi dan tujuan yang dimaksud. Oleh karena itu indikator ini diberi skor atau nilai 2 yaitu sesuai dengan aturan pedoman penilaian kinerja yang ada.

8. Kemudahan pelayanan yaitu tersedianya sarana penunjang dalam rangka memberikan kemudahan pelayanan. Namun perusahaan belum melakukan pelayanan diluar jam kantor sehingga jika terjadi kebocoran atau kerusakan pipa-pipa transmisi maupun distribusi tidak dapat dilakukan. Berdasarkan Kepmendagri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja, maka indikator ini mendapatkan skor atau nilainya adalah 1. Artinya perusahaan belum

menyediakan sarana penunjang dalam rangka memberikan kemudahan pelayanan diluar jam kantor dan sarana tersebut hanya pada saat jam kantor saja.

### **3. Penilaian Kinerja Aspek Operasional**

Sebelum melakukan klasifikasi tingkat keberhasilan perusahaan maka nilai yang diperoleh dari masing-masing indikator di jumlahkan dan hasil penjumlahan tersebut merupakan jumlah nilai yang diperoleh oleh masing-masing aspek. Jumlah keseluruhan nilai untuk aspek operasional masing-masing adalah tahun 2016 memperoleh nilai 13 dan 2017 memperoleh nilai 13. Hal ini menunjukkan bahwa penilaian kinerja dari aspek operasional menurut Kepmendagri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja adalah kurang sehat, karena standar nilai aspek keuangan adalah 40 sedangkan capaiannya lebih kecil standar nilai yang diharapkan yaitu hanya memperoleh nilai sebesar 20 saja. (*Lampiran 10*).

#### **4.1.4.3 Analisis Aspek Administrasi**

##### **1. Aspek Administrasi Tahun 2016**

Untuk memperoleh gambaran tentang perkembangan perusahaan dari aspek administrasi maka perlu dilakukan analisis terhadap indikator-indikator dari aspek administrasi. Indikator-indikator yang dianalisis dari aspek administrasi adalah sebagai berikut:

1. Rencana jangka panjang, yaitu rencana strategi bisnis yang mencakup rumusan mengenai tujuan dan sasaran yang hendak dicapai perusahaan dalam jangka waktu lima tahun mendatang. Pelaksanaan rencana jangka panjang pada BLUD SPAM Provinsi NTT telah dipedomani sebagian sehingga berdasarkan Kepmendagri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja bila dipedomani sebagian maka skor atau nilainya adalah 3. Artinya perusahaan mampu melaksanakan rencana jangka panjang dengan dipedomani sebagian. Hal ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan operasional BLUD SPAM telah dilaksanakan sesuai dengan petunjuk rencana strategi bisnis (RSB) BLUD SPAM lima tahunan. Sehingga dari hasil pelaksanaan yang sudah sesuai dengan pedoman RSB, maka skor atau nilainya adalah 3, yaitu sesuai dengan aturan pedoman penilaian kinerja.
2. Rencana organisasi dan uraian tugas, yaitu struktur organisasi dan tata cara kerja organisasi yang dimiliki oleh BLUD SPAM Provinsi NTT dan disahkan oleh kepala daerah. Pelaksanaan rencana organisasi dan uraian tugas dipedomani sebagian, sehingga berdasarkan Kepmendagri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja jika dipedomani sebagian maka skor atau nilainya adalah 3. Artinya perusahaan mampu melaksanakan rencana organisasi dan uraian tugas dengan dipedomani sebagian. Hal ini menunjukkan bahwa organisasi yang diterapkan serta uraian tugas

pada masing-masing bagian/seksi ada yang sesuai dengan bagiannya masing-masing, namun ada juga yang belum sesuai dengan tugas pokok dari bagian atau seksi yang lainnya sehingga indikator ini memperoleh skor atau nilai 3 berdasarkan pada aturan pedoman penilaian kinerja tersebut.

3. Prosedur operasi standar, yaitu panduan yang mencakup prosedur penanganan operasional perusahaan. Pelaksanaan prosedur operasi standar selalu dipedomani, sehingga berdasarkan Kepmendagri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja jika dipedomani seluruhnya maka skor atau nilainya adalah 4. Artinya perusahaan mampu melakukan kegiatan sesuai dengan prosedur operasi standar. Untuk kegiatan operasional, BLUD SPAM telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang diterapkan atau sesuai dengan SOP sehingga indikator ini memperoleh skor atau nilai 4 berdasarkan pada aturan pedoman penilaian kinerja tersebut.
4. Gambar nyata laksana, yaitu ukuran pelaksanaan manajemen produksi dan distribusi secara baik. Gambar nyata laksana dilaksanakan dan sepenuhnya dipedomani sehingga berdasarkan Kepmendagri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja jika sepenuhnya dipedomani maka skor atau nilainya adalah 4. Artinya gambar nyata laksana dipedomani dalam pelaksanaan manajemen produksi dan distribusi secara baik. Hal ini menunjukkan bahwa petugas lapangan telah ditempatkan kepada beberapa zona

atau wilayah pelayanan sehingga jika ada kejadian kebooran pipa atau terjadinya kekeruhan air, dapat dilaporkan pada saat itu juga. Oleh karena itu, indikator ini memperoleh skor atau nilai 4 yaitu berdasarkan aturan pedoman penilaian kinerja yang ada.

5. Pedoman penilaian kerja karyawan, yaitu alat atau media untuk menilai prestasi kerja karyawan perusahaan. Pedoman penilaian kerja karyawan belum dipedomani sehingga berdasarkan Kepmendagri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja, jika belum memiliki dan belum dipedomani maka skor atau nilainya adalah 2. Artinya pedoman penilaian kerja karyawan belum memiliki dan belum dipedomani dalam pelaksanaannya karena masih ada karyawan yang berstatus PNS yang diperbantukan. Untuk indikator ini masih belum dilakukan oleh pihak BLUD SPAM sendiri karena masih belum memiliki pedoman yang tepat untuk menilai dan memberikan penghargaan (*reward*) kepada karyawan yang dinilai baik, dan memberikan hukuman (*punishment*) bagi karyawan yang dianggap tidak baik. Oleh karena itu indikator ini diberi skor atau nilai 2 yaitu berdasarkan aturan pedoman penilaian kinerja yang ada.
6. Rencana kerja dan anggaran perusahaan, yaitu penjabaran dari rencana strategi bisnis secara tahunan yang mencakup rencana kerja dan anggaran perusahaan. Dalam pelaksanaan rencana bisnis dan anggaran selalu dipedomani sepenuhnya sehingga berdasarkan Kepmendagri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian

Kinerja, jika sepenuhnya dipedomani maka skor atau nilainya adalah 4. Artinya rencana kerja dan anggaran perusahaan sepenuhnya dipedomani dalam melaksanakan kegiatan perusahaan. Rencana kerja dan anggaran yang dilakukan pada setiap tahunnya adalah turunan dari rencana strategi bisnis atau rencana lima tahunan yang dilakukan oleh BLUD SPAM. Hal ini menunjukkan bahwa BLUD SPAM melakukan rencana kerja dan anggaran sesuai dengan kebutuhan yang terjadi pada setiap tahunnya. Oleh karena itu indikator ini diberi skor atau nilai 4 yaitu sesuai dengan aturan pedoman penilaian kinerja yang ada.

7. Tertib laporan internal, yaitu pelaporan yang dilaksanakan dalam bidang keuangan, operasional dan administrasi secara berkala dari pelaksana kepada pengambil keputusan. Laporan tersebut antara lain berupa laporan kas harian dan laporan keuangan bulanan. Laporan internal perusahaan dibuat tidak tepat waktu sehingga berdasarkan Permendagri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja, jika dibuat tidak tepat waktu maka skor atau nilainya adalah 1. Artinya perusahaan belum mampu melaksanakan laporan internal secara tepat waktu. Tertib laporan internal yang dimaksudkan disini adalah laporan internal yang dibuat pada setiap bulan, setiap tiga bulan, setiap enam bulan maupun laporan tahunan selalu mengalami keterlambatan untuk diberikan kepada pengawas internal ataupun pemeriksa internal. Hal ini dapat dikatakan bahwa kurang

konsistennya petugas pembuat laporan BLUD SPAM Provinsi NTT. Oleh karena itu indikator ini diberi nilai 1 yaitu sesuai dengan aturan pedoman penilaian kinerja yang ada.

8. Opini auditor independen, yaitu opini pemeriksa independen mengenai kewajaran laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen. Opini auditor independen mengenai laporan keuangan yang disajikan adalah wajar dengan pengecualian sehingga berdasarkan Kepmendagri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja, jika opini auditor independen adalah wajar dengan pengecualian maka skor atau nilainya adalah 3. Artinya perusahaan mampu menyajikan laporan keuangan dengan opini auditor independen adalah wajar dengan pengecualian. Pengecualian tersebut terhadap keberadaan aktiva tetap yang diterima dari Pemerintah Provinsi belum dilakukan inventarisasi fisik sehingga keberadaan, masa (umur) ekonomis dan nilai penyerahan yang wajar atas aktiva tersebut belum diketahui.
9. Tindak lanjut hasil pemeriksaan tahun akhir, yaitu hasil pencapaian upaya tindak lanjut temuan atau rekomendasi oleh instansi pemeriksa. Tindak lanjut hasil pemeriksaan tahun akhir berupa temuan atau rekomendasi ditindaklanjuti dan seluruhnya selesai sehingga berdasarkan Kepmendagri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja, jika ditindaklanjuti dan seluruhnya selesai maka skor atau nilainya 3. Artinya perusahaan mampu

menindaklanjuti temuan atau rekomendasi dari instansi pemeriksa dan seluruhnya selesai yaitu dengan melakukan inventarisasi fisik aktiva tetap yang diterima dari Pemerintah Provinsi.

## **2. Aspek Administrasi Tahun 2017**

Untuk memperoleh gambaran tentang perkembangan perusahaan dari aspek administrasi maka perlu dilakukan analisis terhadap indikator-indikator dari aspek administrasi. Indikator-indikator yang dianalisis dari aspek administrasi adalah sebagai berikut:

1. Rencana jangka panjang, yaitu rencana strategi bisnis yang mencakup rumusan mengenai tujuan dan sasaran yang hendak dicapai perusahaan dalam jangka waktu lima tahun mendatang. Pelaksanaan rencana jangka panjang pada BLUD SPAM Provinsi NTT telah dipedomani sebagian sehingga berdasarkan Kepmendagri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja bila dipedomani sebagian maka skor atau nilainya adalah 3. Artinya perusahaan mampu melaksanakan rencana jangka panjang dengan dipedomani sebagian. Hal ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan operasional BLUD SPAM telah dilaksanakan sesuai dengan petunjuk rencana strategi bisnis (RSB) BLUD SPAM lima tahunan. Sehingga dari hasil pelaksanaan yang sudah sesuai dengan pedoman RSB, maka skor atau nilainya adalah 3, yaitu sesuai dengan aturan pedoman penilaian kinerja.



2. Rencana organisasi dan uraian tugas, yaitu struktur organisasi dan tata cara kerja organisasi yang dimiliki oleh BLUD SPAM Provinsi NTT dan disahkan oleh kepala daerah. Pelaksanaan rencana organisasi dan uraian tugas dipedomani sebagian, sehingga berdasarkan Kepmendagri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja jika dipedomani sebagian maka skor atau nilainya adalah 3. Artinya perusahaan mampu melaksanakan rencana organisasi dan uraian tugas dengan dipedomani sebagian. Hal ini menunjukkan bahwa organisasi yang diterapkan serta uraian tugas pada masing-masing bagian/seksi ada yang sesuai dengan bagiannya masing-masing, namun ada juga yang belum sesuai dengan tugas pokok dari bagian atau seksi yang lainnya sehingga indikator ini memperoleh skor atau nilai 3 berdasarkan pada aturan pedoman penilaian kinerja tersebut.
3. Prosedur operasi standar, yaitu panduan yang mencakup prosedur penanganan operasional perusahaan. Pelaksanaan prosedur operasi standar selalu dipedomani, sehingga berdasarkan Kepmendagri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja jika dipedomani seluruhnya maka skor atau nilainya adalah 4. Artinya perusahaan mampu melakukan kegiatan sesuai dengan prosedur operasi standar. Untuk kegiatan operasional, BLUD SPAM telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang diterapkan atau sesuai

deng SOP sehingga indikator ini memperoleh skor atau nilai 4 berdasarkan pada aturan pedoman penilaian kinerja tersebut.

4. Gambar nyata laksana, yaitu ukuran pelaksanaan manajemen produksi dan distribusi secara baik. Gambar nyata laksana dilaksanakan dan sepenuhnya dipedomani sehingga berdasarkan Kepmendagri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja jika sepenuhnya dipedomani maka skor atau nilainya adalah 4. Artinya gambar nyata laksana dipedomani dalam pelaksanaan manajemen produksi dan distribusi secara baik. Hal ini menunjukkan bahwa petugas lapangan telah ditempatkan kepada beberapa zona atau wilayah pelayanan sehingga jika ada kejadian kebooran pipa atau terjadinya kekeruhan air, dapat dilaporkan pada saat itu juga. Oleh karena itu, indikator ini memperoleh skor atau nilai 4 yaitu berdasarkan aturan pedoman penilaian kinerja yang ada.
5. Pedoman penilaian kerja karyawan, yaitu alat atau media untuk menilai prestasi kerja karyawan perusahaan. Pedoman penilai kerja karyawan belum dipedomani sehingga berdasarkan Kepmendagri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja, jika belum memiliki dan belum dipedomani maka skor atau nilainya adalah 2. Artinya pedoman penilaian kerja karyawan belum memiliki dan belum dipedomani dalam pelaksanaannya karena masih ada karyawan yang berstatus PNS yang diperbantukan. Untuk indikator ini masih belum dilakukan oleh pihak BLUD SPAM sendiri karena

masih belum memiliki pedoman yang tepat untuk menilai dan memberikan penghargaan (*reward*) kepada karyawan yang dinilai baik, dan memberikan hukuman (*punishment*) bagi karyawan yang dianggap tidak baik. Oleh karena itu indikator ini diberi skor atau nilai 2 yaitu berdasarkan aturan pedoman penilaian kinerja yang ada.

6. Rencana kerja dan anggaran perusahaan, yaitu penjabaran dari rencana strategi bisnis secara tahunan yang mencakup rencana kerja dan anggaran perusahaan. Dalam pelaksanaan rencana bisnis dan anggaran selalu dipedomani sepenuhnya sehingga berdasarkan Kepmendagri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja, jika sepenuhnya dipedomani maka skor atau nilainya adalah 4. Artinya rencana kerja dan anggaran perusahaan sepenuhnya dipedomani dalam melaksanakan kegiatan perusahaan. Rencana kerja dan anggaran yang dilakukan pada setiap tahunnya adalah turunan dari rencana strategi bisnis atau rencana lima tahunan yang dilakukan oleh BLUD SPAM. Hal ini menunjukkan bahwa BLUD SPAM melakukan rencana kerja dan anggaran sesuai dengan kebutuhan yang terjadi pada setiap tahunnya. Oleh karena itu indikator ini diberi skor atau nilai 4 yaitu sesuai dengan aturan pedoman penilaian kinerja yang ada.

7. Tertib laporan internal, yaitu pelaporan yang dilaksanakan dalam bidang keuangan, operasional dan administrasi secara berkala dari pelaksana kepada pengambil keputusan. Laporan tersebut antara lain

berupa laporan kas harian dan laporan keuangan bulanan. Laporan internal perusahaan dibuat tidak tepat waktu sehingga berdasarkan Permendagri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja, jika dibuat tidak tepat waktu maka skor atau nilainya adalah 1. Artinya perusahaan belum mampu melaksanakan laporan internal secara tepat waktu. Tertib laporan internal yang dimaksudkan disini adalah laporan internal yang dibuat pada setiap bulan, setiap tiga bulan, setiap enam bulan maupun laporan tahunan selalu mengalami keterlambatan untuk diberikan kepada pengawas internal ataupun pemeriksa internal. Hal ini dapat dikatakan bahwa kurang konsistennya petugas pembuat laporan BLUD SPAM Provinsi NTT. Oleh karena itu indikator ini diberi nilai 1 yaitu sesuai dengan aturan pedoman penilaian kinerja yang ada.

8. Opini auditor independen, yaitu opini pemeriksa independen mengenai kewajaran laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen. Opini auditor independen mengenai laporan keuangan yang disajikan adalah wajar dengan pengecualian sehingga berdasarkan Kepmendagri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja, jika opini auditor independen adalah wajar dengan pengecualian maka skor atau nilainya adalah 3. Artinya perusahaan mampu menyajikan laporan keuangan dengan opini auditor independen adalah wajar dengan pengecualian. Pengecualian tersebut terhadap keberadaan aktiva tetap yang diterima dari

Pemerintah Provinsi belum dilakukan inventarisasi fisik sehingga keberadaan, masa (umur) ekonomis dan nilai penyerahan yang wajar atas aktiva tersebut belum diketahui.

9. Tindak lanjut hasil pemeriksaan tahun akhir, yaitu hasil pencapaian upaya tindak lanjut temuan atau rekomendasi oleh instansi pemeriksa. Tindak lanjut hasil pemeriksaan tahun akhir berupa temuan atau rekomendasi ditindaklanjuti dan seluruhnya selesai sehingga berdasarkan Kepmendagri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja, jika ditindaklanjuti dan seluruhnya selesai maka skor atau nilainya 3. Artinya perusahaan mampu menindaklanjuti temuan atau rekomendasi dari instansi pemeriksa dan seluruhnya selesai yaitu dengan melakukan inventarisasi fisik aktiva tetap yang diterima dari Pemerintah Provinsi.

### **3. Penilaian Kinerja Aspek Administrasi**

Sebelum melakukan klasifikasi tingkat keberhasilan perusahaan maka nilai yang diperoleh dari masing-masing indikator di jumlahkan dan hasil penjumlahan tersebut merupakan jumlah nilai yang diperoleh oleh masing-masing aspek. Jumlah keseluruhan nilai untuk aspek keuangan masing-masing adalah tahun 2016 memperoleh nilai 27 dan tahun 2017 memperoleh nilai 27. Hal ini menunjukkan bahwa penilaian kinerja dari aspek administrasi menurut Kepmendagri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja adalah baik, karena standar

nilai aspek administrasi adalah 15 sedangkan capaiannya lebih dari standar nilai yang diharapkan yaitu sebesar 27. (*Lampiran 11*).

#### **4.1.5 Penilaian Kinerja BLUD SPAM Tahun 2016**

Setelah jumlah nilai yang diperoleh dari masing-masing aspek diketahui maka untuk memperoleh nilai kinerja dari masing-masing aspek adalah dengan membandingkan nilai kinerja yang diperoleh dengan nilai maksimum dari masing-masing aspek dan dikalikan dengan bobot dari masing-masing aspek. Dengan demikian maka nilai yang diperoleh dari aspek keuangan adalah 14,99 dan aspek operasional adalah 11,06 serta aspek administrasi adalah 11,25, sehingga nilai kinerja BLUD SPAM Tahun 2016 adalah sebesar 37,3. Artinya bahwa kinerja BLUD SPAM Provinsi NTT dinilai kurang baik. (*Lampiran 12*)

Oleh karena itu pengawas internal harus melakukan evaluasi rutin setiap tiga bulan sekali agar dapat mengambil suatu tindakan atau kebijakan demi meningkatkan perkembangan kinerja BLUD SPAM kedepannya yang lebih baik.

#### **4.1.6 Penilaian Kinerja BLUD SPAM Tahun 2017**

Setelah jumlah nilai yang diperoleh dari masing-masing aspek diketahui maka untuk memperoleh nilai kinerja dari masing-masing aspek adalah dengan membandingkan nilai kinerja yang diperoleh dengan nilai maksimum dari masing-masing aspek dan dikalikan

dengan bobot dari masing-masing aspek. Dengan demikian maka nilai yang diperoleh dari aspek keuangan adalah 14,99 dan aspek operasional adalah 11,06 serta aspek administrasi adalah 11,25, sehingga nilai kinerja BLUD SPAM Tahun 2016 adalah sebesar 37,3. Artinya bahwa kinerja BLUD SPAM Provinsi NTT dinilai kurang baik. (*Lampiran 13*)

Oleh karena itu pengawas internal harus melakukan evaluasi rutin setiap tiga bulan sekali agar dapat mengambil suatu tindakan atau kebijakan demi meningkatkan perkembangan kinerja BLUD SPAM kedepannya yang lebih baik.

## **4.2 Pembahasan**

Hasil analisis penilaian kinerja BLUD SPAM Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 yaitu untuk tahun 2016 bahwa kinerja BLUD SPAM adalah “cukup”. Dilihat dari hasil analisis, tingkat kinerja pada periode tersebut diperoleh bahwa tingkat kinerja pada tahun 2016 mendapatkan nilai sebesar 37,3, dimana capaian kinerja dengan nilai 45-60 adalah cukup, sesuai dengan peraturan yang ada. Sedangkan pada tahun 2017 tingkat kinerja yang diperoleh dari hasil analisis diatas mendapatkan nilai 37,3 yang artinya tingkat kinerja BLUD SPAM pada periode tersebut adalah “cukup”, yang mana sesuai dengan Kepmendagri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja bahwa jika memperoleh nilai 45-60 diberi nilai cukup.

Rendahnya nilai yang dicapai disebabkan terutama karena harga jual air lebih rendah dimana harga jual air per meter kubik hanya memperhitungkan harga pokoknya saja tanpa memperhitungkan adanya unsur laba sesuai tingkat keuntungan yang diharapkan sehingga perusahaan mengalami kerugian. Kerugian tersebut sangat mempengaruhi rendahnya rasio laba terhadap penjualan dan rasio-rasio yang lainnya.

Hal ini menunjukkan masih perlu peningkatan kinerja dari aspek keuangan yang terutama adalah rasio laba sebelum pajak terhadap aktiva produktif, rasio laba sebelum pajak terhadap penjualan, rasio aktiva lancar terhadap hutang lancar, rasio utang jangka panjang terhadap ekuitas dan rasio biaya operasi terhadap pendapatan operasi.

Dari hasil analisis dikatakan bahwa aspek keuangan pada tahun 2016 dan 2017 hanya mencapai nilai 14,99. Dimana aspek keuangan terdiri dari beberapa rasio, yaitu rasio laba terhadap aktiva produktif dengan nilai yang dicapai 4,95%, rasio laba terhadap penjualan dengan nilai yang dicapai 107%, rasio aktiva lancar terhadap utang lancar dengan nilai yang dicapai 19,29, rasio utang jangka panjang terhadap ekuitas dengan nilai yang dicapai Rp. 0,012, rasio total aktiva terhadap total utang dengan nilai yang dicapai Rp. 74,63, rasio biaya operasi terhadap pendapatan operasi dengan nilai yang dicapai Rp. 1,27, rasio aktiva produktif terhadap penjualan air dengan nilai yang dicapai 22,52%, rasio jangka waktu penagihan piutang dengan nilai yang dicapai 44 hari dan rasio epektifitas tertagih dengan nilai yang dicapai 85,76%.



Penilaian aspek operasional terdiri dari beberapa indikator yaitu cakupan pelayanan dengan nilai yang dicapai 22,99%, kualitas air distribusi memenuhi syarak air bersih sesuai dengan laboratorium Dinas Kesehatan Provinsi NTT, kontinuitas air yaitu dengan pelayanan masih kurang yaitu dibawah dari 24 jam per hari, produktifitas pemanfaatan instalasi produksi dengan memperoleh nilai 66,66%, tingkat kehilangan air dengan memperoleh nilai 15,09% pada tahun 2016 dan 11,41% pada tahun 2017, peneraan meter yang masih belum dilakukan oleh perusahaan, indikator kemampuan penanganan pengaduan rata-rata perbulan yaitu penanganan yang optimal dan sigap, dan indikator kemudahan pelayanan yaitu pelayanan yang belum optimal karena hanya melayani saat jam kantor saja.

Sedangkan aspek administrasi memiliki beberapa indikator, diantaranya adalah rencana jangka panjang sesuai dengan restra bisnis perusahaan, rencana organisasi dan uraian tugas yang masih belum optimal, prosedur operasi standar yang sudah sesuai standara operasional perusahaan, gambar nyata laksana, pedoman penilaian kinerja karyawan yang belum dilakukan secara optimal, rencana kerja dan anggaran perusahaan yang sudah sesuai dengan rencana anggaran tahunan, tertib laporan keuangan yang masih belum tepat waktu, opini auditor independen yakni mengenai kewajaran laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan tahun akhir yang sudah dilakukan dengan cepat jika ada rekomendasi dari pemeriksa.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan diatas, baik itu dari aspek aspek keuangan, aspek operasional maupun aspek administrasi dan dapat dikaitkan dengan teori-teori yang menjadi landasan teoritis dan hasil penelitian terdahulu serta latarbelakang masalah dalam penelitian ini, maka pembahasan hasil penelitian sebagai berikut.

Hasil rata-rata penilaian kinerja diperoleh dari aspek keuangan tahun 2016 sebesar 14,99, aspek operasional sebesar 11,06 dan aspek administrasi sebesar 11,25. Sedangkan pada tahun 2017 memperoleh nilai sebesar 14,99 untuk aspek keuangan, 11,06 untuk aspek operasional dan 11,25 untuk aspek administrasi. Hal ini menunjukkan bahwa nilai kinerja dari BLUD SPAM Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2016 adalah 37,3 dan pada tahun 2017 adal 37,3. Kinerja BLUD SPAM pada tahun 2016 dan tahun 2017 adalah tetap atau tidak mengalami peningkatan, sehingga dinilai cukup baik. Hasil memperkuat kajian terdahulu oleh Mega Oktavia Ropa(2016)Septi Ernelly Permana (2013) Valentina (2009) dan Famela Mulya Lestari (2012).

Penelitian dari aspek keuangan bertentanga dengan teori yang disampaikan oleh Mahsun (2006:25) mendefenisikan Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/ program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi. Menurut Sinambela (2006 : 137) kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh pegawai atau sekelompok pegawai dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan

secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral dan etika. Dari pengertian kinerja yang dikutip dari pendapat para ahli maka penulis menyimpulkan bahwa kinerja adalah suatu prestasi kerja dari seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada sesuai dengan tugas dan kewenangannya untuk mencapai tujuan organisasi sesuai dengan misi dan visi organisasi.

Pengukuran kinerja pada dasarnya digunakan untuk penilaian atas keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan dan pengukuran kinerja mencakup penetapan indikator kinerja dan penetapan capaian indikator kinerja. Pengukuran kinerja merupakan alat yang penting untuk mengevaluasi nilai uang di sektor publik yang didasarkan pada tiga elemen utama yaitu ekonomi, efisiensi dan efektifitas.

Badan Pengawas pada BLUD SPAM Provinsi Nusa Tenggara Timur selama ini belum melakukan penilaian terhadap kinerja BLUD SPAM Provinsi Nusa Tenggara Timur agar dapat mengetahui bagaimana kinerja BLUD SPAM Provinsi Nusa Tenggara Timur maka perlu dilakukan penilaian terhadap kinerja BLUD SPAM Provinsi Nusa Tenggara Timur. Penilaian kinerja BLUD SPAM Provinsi Nusa Tenggara Timur dilakukan dengan berpedoman pada Kepmendagri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja BLUD SPAM Provinsi Nusa Tenggara Timur dari tiga aspek yaitu aspek keuangan, aspek operasional dan aspek administrasi.